



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

# POLICY BRIEF

**STRATEGI PEMBERDAYAAN  
POSYANDU UNTUK  
PERBAIKAN GIZI  
MASYARAKAT**



Foto: flickr/sehatnegeriku

**ALI KHOMSAN**

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT  
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA  
IPB UNIVERSITY

## Posyandu dan Perbaikan Gizi

Salah satu tujuan SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan semua orang di segala usia (United Nations 2016). Dalam upaya menurunkan tingkat kematian balita, pencegahan dan penanganan masalah gizi memegang peranan penting. Posyandu sebagai ujung tombak memiliki peran krusial dalam mencegah dan mengatasi masalah gizi seperti stunting, gizi kurang, gizi buruk, dan anemia. Oleh karena itu, revitalisasi posyandu merupakan langkah penting yang harus diwujudkan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan gizi di masyarakat.

Posyandu merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Posyandu dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri RI dan Kepala BKKBN pada tahun 1986. Posyandu berperan sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Posyandu memberikan layanan terpadu bagi anak berupa pemantauan tumbuh kembang dan asupan gizi, serta kesempatan konsultasi dan berbagi pengalaman bagi ibu, yang semuanya berkontribusi positif bagi perkembangan anak (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2019).

Jumlah posyandu saat ini mencapai 213.670 unit, tetapi diperkirakan hanya 40 persen yang melaksanakan fungsinya dengan baik. Selain itu cakupan posyandu juga masih rendah yaitu 50 persen untuk anak balita dan 20 persen untuk ibu hamil. Secara keseluruhan kader posyandu terlatih berjumlah 30 persen.

Pemberdayaan posyandu adalah langkah penting yang akan berdampak kuat terhadap peningkatan gizi masyarakat. Pembiayaan program-program layanan gizi melalui posyandu harus mendapat perhatian pemerintah baik dari besaran maupun kontinuitas. Posyandu bukan sekedar tempat menimbang anak balita, tetapi ada layanan-layanan gizi dan kesehatan yang tentu memerlukan pembiayaan dan dukungan pemerintah.

## Strategi Peningkatan Kinerja Posyandu

**Pemberdayaan Kader Posyandu.** Selama ini kader posyandu hanya menjadi tenaga sukarela karena posyandu dianggap gerakan dari masyarakat dan untuk masyarakat yang mendapat dukungan dari instansi pemerintah. Kader diharapkan memberdayakan masyarakat untuk memecahkan masalah gizi dan kesehatan tetapi, mereka tidak dipersyaratkan memiliki pengetahuan dan kemampuan memadai serta minimnya insentif dan dukungan sering menghambat kinerja mereka (Iswarawanti 2010). Padahal, kader adalah manusia yang juga memerlukan penghargaan finansial karena partisipasinya dalam perbaikan gizi masyarakat. Untuk itu pemberdayaan posyandu harus didukung dana pemerintah, untuk insentif kader, agar kader lebih mempunyai komitmen dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan kader posyandu secara rutin dan berkesinambungan mutlak diperlukan sehingga mereka benar-benar paham mengenai fenomena masalah gizi di masyarakat. Peran kader posyandu tidak hanya dilakukan saat hari buka posyandu karena kader harus proaktif mengunjungi masyarakat yang enggan atau tidak mau berkunjung ke posyandu. Inilah wujud kerja keras kader posyandu yang harus dihargai dalam bentuk pemberian insentif yang signifikan.

**Pemberian Makanan Tambahan.** Pemberdayaan posyandu mensyaratkan perlunya pembenahan program makanan tambahan (PMT). Partisipan posyandu yang berasal dari keluarga miskin harus mendapat bantuan pangan seperti telur, susu, dan atau jenis makanan bergizi lainnya yang dapat mencukupi 30 persen dari angka kecukupan gizi anak balita. Mengapa hal ini harus dilakukan? Fenomena masalah gizi, menurut UNICEF, berakar dari kemiskinan yang menyebabkan keluarga-keluarga miskin tidak mampu mengakses pangan secara cukup. Akhirnya yang menjadi korban pertama adalah anak balita karena mereka adalah kelompok rawan gizi yang tidak mampu menyuarakan kebutuhannya.

Intervensi gizi dalam posyandu selama ini sering diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT) secara gratis seperti secangkir kacang hijau atau sebutir telur setiap bulan. Meskipun tujuan ideal PMT ini tidak hanya memberikan makanan tambahan, tetapi juga untuk mengedukasi ibu dan keluarga tentang pemberian

makan yang tepat sesuai umur, penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, dan keamanan pangan melalui edukasi, penyuluhan, dan konseling gizi dan kesehatan (Baskoro 2023). Namun, kenyataan yang ada di lapangan seringkali berbeda.

Upaya memperbaiki gizi anak-anak balita dari keluarga miskin tentu tidak cukup dengan makanan tambahan seperti itu. Pada hakikatnya, bagi keluarga miskin tidak perlu penyuluhan gizi yang muluk-muluk, yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa mengakses pangan murah, gratis, atau bersubsidi khususnya untuk memenuhi gizi anak-anaknya yang sedang dalam masa pertumbuhan. Posyandu harus dapat mencegah anak-anak balita agar tidak menderita gizi kurang (satu tahap sebelum jatuh ke dalam status gizi buruk atau *stunting*).

Menyadari hal tersebut, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional mulai tahun 2025 akan memberikan bantuan makanan tambahan gratis untuk anak-anak balita. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak usia dini adalah calon-calon generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Pemerintah akan dianggap lalai apabila masalah gizi masyarakat dibiarkan terus merebak.

**Tingkat Partisipasi.** Selama ini posyandu telah memberikan berbagai pelayanan seperti penimbangan balita, vaksinasi/ imunisasi, pemberian tablet besi untuk ibu hamil dll. Kalau kehadiran anak balita dan ibunya di posyandu dapat dipertahankan sampai anak berusia lima tahun, maka posyandu memang dapat menjadi ujung tombak pencegahan masalah gizi. Namun, bila ternyata anak-anak balita sudah *drop-out* dari posyandu ketika usia belum mencapai lima tahun, maka hal dapat memunculkan ancaman masalah gizi.

Ketidakhadiran di posyandu disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin layanan vaksinasi/imunisasi yang diterima anak balita sudah tuntas, ibu balita merasa sibuk, anak sedang terlelap tidur dan atau alasan-alasan lainnya. Ketidakkonsistenan dalam menimbang anak karena rendahnya partisipasi di posyandu akan menyulitkan pemantauan status gizi anak. Posyandu berperan penting dalam mendeteksi status gizi balita melalui kunjungan rutin (Rehing *et al.* 2021). Dukungan dan partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar program pembangunan berhasil, mengingat masyarakat

merupakan bagian integral dari proses pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun penerima dampak (Akbar *et al.* 2016).

**Perbaikan Edukasi Gizi.** Posyandu yang jangkauannya sudah sangat luas sangat layak untuk menerima beban tanggung jawab dalam penanggulangan problem gizi masyarakat. Untuk itu diperlukan revitalisasi posyandu dengan cara melengkapi dan meningkatkan pelayanannya. Pelayanan yang sangat penting dan selama ini menjadi titik lemah posyandu adalah edukasi gizi untuk ibu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hal ini tidak terlepas dari kualitas kader yang ada di setiap posyandu. Puskesmas sebagai pembina posyandu harus melakukan kegiatan peningkatan mutu kader melalui pelatihan-pelatihan gizi dan kesehatan .

Dari aspek sarana-prasarana, kebanyakan tempat penyelenggaraan posyandu belum dapat dianggap ideal. Kegiatan posyandu seringkali dilaksanakan di tempat yang bukan bangunan khusus posyandu (Akbar *et al.* 2016). Tempat layanan posyandu sering kurang layak untuk dapat dilakukannya edukasi gizi secara baik, sehingga kegiatan penyuluhan atau edukasi gizi nyaris tidak pernah dilakukan.

Falsafah edukasi gizi yang harus dipegang adalah: bila Anda memberi ikan pada seseorang, maka Anda harus memberinya lagi besok. Namun, bila Anda mengajarnya memancing, maka dia akan mencari ikan sendiri. Intinya, edukasi gizi akan memberikan dampak jangka panjang bagi perbaikan pengetahuan, sikap dan perilaku gizi. Hal ini menjadi salah satu kunci untuk mendorong munculnya keluarga sadar gizi. Gerakan Sadar Pangan dan Gizi pertama kali dicanangkan oleh Presiden RI tahun 1989 di Wonogiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar MA, Kandarina BI, Alit Gunawan IM. 2016. Studi ketidakaktifan kader posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Paramasan, Banjar, Kalimantan Selatan. *J Gizi dan Diet Indones (Indonesian J Nutr Diet.* 3(1):60. doi:10.21927/ijnd.2015.3(1).60-67.
- Baskoro A. 2023. Pemberian Makanan Tambahan pada Balita. *ayosehat.kemkes.go.id.*, siap terbit. <https://ayosehat.kemkes.go.id/pemberian-makanan-tambahan-pada-balita>.
- Iswarawanti DN. 2010. Kader Posyandu : Peranan Dan Tantangan Pemberdayaannya Dalam Usaha Peningkatan Gizi Anak Di Indonesia. *J Manaj pelayanan Kesehatan.* 13(04):169–173. <https://core.ac.uk/download/pdf/290134780.pdf>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Pentingnya Rutin Membawa Balita ke Posyandu untuk Menjaga Tumbuh Kembangnya. *ayosehat.kemkes.go.id.*, siap terbit. <https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-rutin-membawa-balita-ke-posyandu-untuk-menjaga-tumbuh-kembangnya>.
- Rehing EY, Suryoputro A, Adi S. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Ibu Balita Ke Posyandu: Literatur Review. *J Ilmu Keperawatan dan Kebidanan.* 12(2):256. doi:10.26751/jikk.v12i2.1003.
- United Nations. 2016. The 17 Goals. <https://sdgs.un.org/goals>.